

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyikapi perkembangan nasional dan internasional yang semakin dinamis, Indonesia sebagai negara yang berdaulat tidak bisa terus berdiam diri tanpa melakukan sesuatu perubahan dan pembaharuan. Tantangan ke depan yang harus dihadapi bangsa dan negara ini akan semakin berat, karena perkembangan dunia ke depan yang semakin mengglobal telah menempatkan negara – negara di dunia menjadi semakin dekat dan bahkan nyaris tanpa batas. Kenyataan demikian, bagi negara Indonesia bukan saja merupakan tantangan tapi juga sekaligus ancaman yang besar.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut diatas, pembaharuan dalam segala bidang termasuk perubahan fokus pemerintahan dari sentralistis ke arah desentralistis menjadi tidak terelakkan. Sebab, dengan menempatkan daerah sebagai fokus pemerintahan yang otonom diharapkan dapat menjadi pusat legitimasi kekuasaan sehingga pejabat-pejabat daerah akan mempunyai derajat legitimasi yang tinggi baik akseptabilitasnya maupun kredibilitasnya di mata rakyat.

Pemerintahan lokal merupakan miniatur pemerintahan nasional. Oleh karena itu, pemberian otonomi seluas-luasnya terhadap daerah merupakan sarana pejabat-pejabat yang berkeinginan menjabat di level nasional untuk mengaktualisasikan diri dan menunjukkan kemampuan mereka. Dengan demikian apabila seorang pemimpin atau pejabat di daerah berhasil mengembangkan daerahnya, maka pengalaman ini bisa dijadikan sebagai bekal penting untuk menjalankan pemerintah yang lebih luas.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom. Tujuan pemberian Otonomi kepada Daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut maka kepada daerah perlu diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi era Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 harus mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri, diantaranya dengan dibentuk dinas-dinas daerah. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Urusan yang diselenggarakan oleh Dinas-Dinas Daerah adalah urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah.

Salah satu potensi pembangunan Kabupaten Karanganyar adalah meningkatkan kebersihan kota. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan penanganan sampah secara terpadu yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karanganyar.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan hidup sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik, terutama di kota – kota besar. Kemampuan pengelola sampah dalam menangani sampah tidak seimbang dengan produksinya, sehingga sampah menumpuk di mana-mana. Sampah yang tidak terurus dengan baik akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan nilai estetika lingkungan karena pencemaran air, udara dan berkembangnya hama penyakit, sehingga pemukiman penduduk di sekitar tumpukan sampah tersebut tidak layak lagi bagi penduduk. Masalah sampah yang timbul di Kabupaten Karanganyar adalah karena sulitnya pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemanfaatan dan pemusnahan sampah, baik sampah yang berasal dari rumah tangga, pasar, industri maupun sampah kantor. Sulitnya penanganan sampah erat kaitannya dengan buruknya kondisi pemukiman penduduk, karena pertumbuhan pemukiman yang tidak teratur akan

mempersulit proses pengumpulan dan pengangkutan sampah sehingga akhirnya menumpuk.

Perencanaan penanganan sampah merupakan masalah yang kompleks, karena harus memperhitungkan sistem transportasi, penggunaan lahan, perkembangan masyarakat dan daerah serta kesehatan masyarakat. Penanganan sampah tidak cukup hanya dilakukan oleh aparat pemerintah, akan tetapi harus melibatkan pihak swasta dan setiap rumah tangga dengan penanganan sampah tergantung pada kerjasama dan kesadaran setiap rumah tangga, masyarakat, swasta dan pemerintah dalam menyimpan, mengumpulkan, membawa, dan menimbun sampah dengan koordinasi dan pengaturan tempat pembuangan sampah yang baik.

Sampah sebetulnya dapat digunakan sebagai salah satu sumber energi yang potensial bila diolah dengan baik, namun usaha untuk memanfaatkan sampah sebagai salah satu sumber energi sampai saat ini masih jarang sekali. Dalam memanfaatkan sampah sebagai sumber energi perlu kerjasama yang terpadu antara pihak pengelola sampah (Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten) dengan perusahaan yang mengolah sampah menjadi sumber energi serta masyarakat yang mau menggunakan energi yang bersumber dari sampah. Perkembangan industri pengolah sampah dan industri yang menggunakan energi bersumber dari sampah perlu dirangsang dengan memberikan kemudahan dan berbagai fasilitas.

Dengan berpandangan pada dasar yang melatarbelakangi judul penulisan hukum ini, maka Penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya dalam sebuah penulisan hukum dengan judul:

“PERANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KARANGANYAR.”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu penelitian. Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, maka perlu dirumuskan suatu permasalahan yang disusun secara sistematis, sehingga

sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan memudahkan pemahaman terhadap masalah yang diteliti sehingga penelitian ini mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk dapat mengetahui metode atau kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat dipergunakan dalam masing-masing macam penelitian hukum.

(Sunaryati Hartono, 1994: 11)

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karanganyar.
 - b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk mengetahui data-data yang akan Penulis pergunakan sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar keserjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui permasalahan dan solusi dalam bentuk penulisan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang Penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya bagi Penulis saja, namun diharapkan juga berguna bagi pihak – pihak lain. Adapun

manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang Hukum pada umumnya, dan Hukum Tata Negara pada khususnya.
 - b. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti mengenai peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan suatu data dan informasi tentang peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar.
 - b. Dengan penelitian ini diharapkan pembaca atau masyarakat mengetahui lebih jauh mengenai peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar.

E. Metode Penelitian

Inti daripada metode dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan (Bambang Waluyo, 1991: 17).

Metode penelitian merupakan unsur yang penting dalam penelitian dan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang

keadaan dan gejala-gejala lainnya dengan cara mengumpulkan data-data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa dan menginterpretasikan.

Dalam penelitian ini Penulis hendak memaparkan tentang peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar serta hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil Penulis untuk menyusun penulisan hukum tentang peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar ini adalah bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Karanganyar khususnya di Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

3. Jenis Data

Data adalah fakta, informasi, gejala, angka, keadaan, proporsi, perilaku, peristiwa dan lain-lain yang diperoleh dari suatu penelitian. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini, Penulis mendapatkan data primer dari pejabat yang memiliki informasi langsung dengan masalah penelitian, khususnya pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah oleh suatu pihak, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh dari dokumen atau arsip, bahan pustaka, laporan dan sebagainya terutama yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer adalah badan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- 1) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan adalah:

a. Sumber data primer

Yang menjadi sumber data primer adalah semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang dan staf pegawai kantor Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berhubungan dengan penelitian ini, khususnya pegawai Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

b. Sumber data sekunder

Yang menjadi sumber data sekunder adalah sejumlah data yang diperoleh melalui studi pustaka termasuk di dalamnya literatur, Peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen yang melengkapi sumber data yang dalam hal ini berhubungan dengan obyek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan penulisan hukum ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelitian langsung yang dilakukan penulis di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian di lapangan ini Penulis lakukan dengan cara:

1) Observasi

Merupakan pengamatan yang sistematis yang Penulis lakukan dengan mendatangi lokasi penelitian dan mengadakan pengamatan

langsung di Kantor Pemerintah Kabupaten Karanganyar, khususnya Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

2) Wawancara

Merupakan cara yang dipergunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan melalui proses tanya jawab langsung sehingga responden dapat menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

b. Studi Kepustakaan

Dalam studi Kepustakaan ini Penulis menggunakan bahan-bahan pustaka dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, surat kabar, majalah, Peraturan Perundang-undangan, kamus, serta dokumen– dokumen untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

6. Teknik Analisa Data

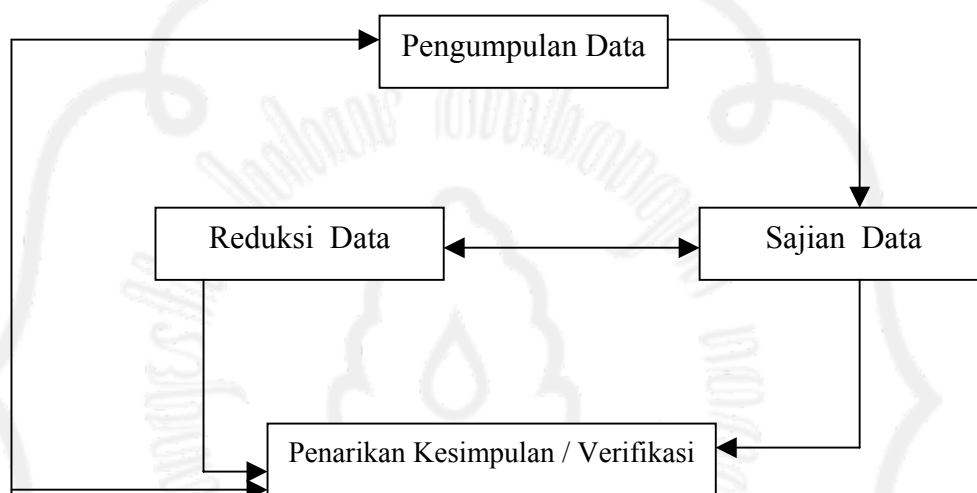
Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah, kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya.

Setelah data terkumpul dan dipandang cukup lengkap, Penulis mengolah dan menganalisis data dengan memisah-misahkan data menurut kategori masing-masing kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

Dalam penelitian kualitatif proses analisis, kegiatannya pada dasarnya dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data. Tiga komponen utama yaitu reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan ataupun verifikasi saling terkait dan berinteraksi, tidak dapat dipisahkan. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses serta menentukan hasil akhir analisis.

Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data belum berlangsung diteruskan pada waktu pengumpulan data dan bersamaan

dengan dua komponen lain. Peneliti tetap bergerak di antara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama kegiatan. Pengolahan data berlangsung setelah pengumpulan data berakhir. Peneliti bergerak diantara tiga komponen utama analisis dengan menggunakan waktu yang masih tersisa dalam penelitiannya. Proses analisa semacam ini disebut sebagai Model Analisis Interaktif atau Interactive Model of Analysis. (HB. Sutopo, 2000: 40).



Gambar Interactive Model of Analysis

F. Sistematika Penulisan Hukum

Agar penulisan ini terarah dan sistematis, maka secara garis besar penulisan skripsi ini meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah
2. Tinjauan tentang Otonomi Daerah
3. Tinjauan tentang Dinas Daerah

B. Kerangka Pemikiran

BAB III : PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Landasan Hukum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karanganyar
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karanganyar

B. Pengelolaan Sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karanganyar

1. Pengertian dan Penggolongan Sampah
2. Pengelolaan Sampah

C. Hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karanganyar

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA